



**► PENATAAN KAWASAN**

## PKL Malioboro Dibebaskan dari Retribusi

**Jumali**  
[jumali@harianjogja.com](mailto:jumali@harianjogja.com)

JOGJA—Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan Malioboro, Jogja, akan dibebaskan dari kewajiban membayar retribusi untuk sementara di Kawasan Relokasi. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY berjanji tidak akan menarik retribusi kepada

PKL kawasan Malioboro di lokasi baru yakni di eks gedung Bioskop Indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY dengan mempertimbangkan sejumlah aspek.

Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Dinkop UKM) DIY, Srie Nurkyatsiwi, mengatakan rencana relokasi pedagang Malioboro dilakukan Januari 2022. Para

pedagang ditempatkan di eks gedung Bioskop Indra dan eks gedung Dinas Pariwisata DIY.

Adanya relokasi, juga telah dipikirkan Pemda DIY, terkait dengan kemungkinan penurunan pendapatan pedagang di tempat yang baru.

"Setelah dipindahkan sementara tidak akan ada retribusi. Karena pasti ada

penurunan pendapatan di awal lokasi baru tersebut," kata Siwi sesuai menerima audiensi pedagang kaki lima Malioboro di Gedung DPRD DIY, Rabu (15/12).

Agar kondisi sepi dan penurunan pendapatan tidak berlangsung lama, Siwi mengatakan jawabannya akan berkoordinasi dengan sejumlah

dinas, baik Dinas Kebudayaan maupun Dinas Pariwisata DIY untuk menggelar *event* dan memperkenalkan lokasi baru para pedagang kepada para wisatawan. "Skema itu ada. Tentu nanti kami berkoordinasi untuk pelaksanaannya," ujar Siwi.

► Halaman 10

### PKL Malioboro...

Menurut Siwi, saat ini bersama dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogja terus menyosialisasikan rencana relokasi ke 1.800 pedagang di Malioboro pada Januari 2022. Sejauh ini, komunikasi intens telah dilakukan kepada paguyuban pedagang dan hasilnya cukup positif.

"Untuk itu, kami diberi waktu secara proses untuk komunikasi lebih," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi B DPRD DIY, Dwi Wahyu Budiantoro, mengatakan wakil rakyat dalam waktu dekat akan berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogja terkait dengan konsep penataan. Selain itu, Dinas Kebudayaan Kota Jogja juga menangani teknis relokasi. "Kalau Dinkop UKM DIY kan sebatas pendampingan

ke pedagang agar produk diterima di pasar. Untuk itu kami mau koordinasi dengan Dinas Kebudayaan Kota Jogja," kata Dwi.

Ketua DPD Asosiasi Pedagang Kaki Lima Yogyakarta (APKLY), Wawan Suhendra, meminta pemerintah menunda rencana relokasi. Sebab PKL Malioboro keberatan direlokasi, mereka setuju jika ditata. Selain itu, lokasi baru dinilai belum representatif untuk memberikan jaminan perekonomian.

Wawan menambahkan selama ini PKL adalah rohnya Malioboro. PKL bak kosmetik yang turut mempercantik wajah Kota Jogja. "Yang sudah sedemikian unik menarik, kenapa harus diubah," ucapnya.

Trotoar Malioboro akan

dikosongkan dari ribuan PKL dan didesain sebagai kawasan pedestrian alias pejalan kaki seperti yang diterapkan di beberapa negara.

Salah satu rujukan penataan Malioboro adalah jalur pedestrian di Singapura, Orchard Road. Jalur pedestrian di Singapura itu dibuat lebar dan ditumbuhi bunga-bunga sehingga memanjakan pejalan kaki. Di jalur pedestrian atau trotoar, tak ada pedagang kaki lima.

Tak hanya itu, jalur pedestrian di negeri jiran tersebut juga bebas asap rokok. Ihwal asap rokok, Pemerintah Kota Jogja sudah menetapkan Malioboro sebagai kawasan tanpa rokok (KTR) sejak 12 November 2020 berdasarkan Perda Kota Jogja No.2/2017 tentang KTR.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 11 Juli 2026

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005